



**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 008 /SK/K.DKPP/SET-03/VIII/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/SK/K.DKPP/SET-
03/II/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR
002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM
Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
UMUM PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2021 – 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan
Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, perlu dibentuk tim pemeriksa daerah
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan umum di daerah;
- b. bahwa tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari Unsur
DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Unsur
Masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa akan berakhirnya perpanjangan masa kerja tim
pemeriksa daerah tanggal 31 Agustus 2022 sesuai dengan
Surat Keputusan Nomor 003/SK/K.DKPP/SET-03/II/2022
tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 Tentang Pengangkatan
Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Setiap Provinsi di
Indonesia Periode Tahun 2021 – 2022;
- d. Mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam huruf a,
b dan c, perlu ditetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang
Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada
setiap Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2021-2022
diperpanjang masa baktinya hingga tanggal 30 September
2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252);

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-010.01.1.483005/2022 Revisi 5 Tanggal 12 Agustus 2022.
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/ 2016 tanggal 13 September 2016 hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/SK/K.DKPP/SET-03/II/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA;
- PERTAMA : Mengubah Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 003/SK/K.DKPP/SET-03/II/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Nomor 002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Setiap Provinsi Di Indonesia;
- KEDUA : Memperpanjang keanggotaan tim pemeriksa daerah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum pada setiap provinsi di seluruh Indonesia masa jabatan 1 April 2021 s.d. 30 September 2022, masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim pemeriksa daerah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai majelis sidang diberikan honorarium majelis sidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim pemeriksa daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 dan 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2022

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**

PROF. DR. MUHAMMAD, S.IP., M.SI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 000/SK/K.DKPP/SET-03/VIII/2022

TANGGAL : 20 Agustus 2022

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE TAHUN 2021-2022

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Aceh	1. Kurniawan S, S.H., LL.M	Masyarakat
		2. Teuku Kemal Fasya, M.Hum	Masyarakat
		3. Munawarsyah, S.HI., M.A 4. Ir. Tharmizi, M.H	KIP KIP
2.	Sumatera Utara	5. Faizah, SP 6. Marini, S.Pt	Panwaslih Panwaslih
		1. Yenni Chairiah Rambe, S.H. 2. Dr. Iskandar Zulkarnain, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Herdensi, S.sos., M.SP 4. Syafrialsyah, S.E., M.Si	KPU Provinsi KPU Provinsi
3.	Sumatera Selatan	5. Suhadi Sukendar Situmorang, S.H., M.H 6. Agus Salam	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
		1. Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Masyarakat
		2. Hendri Almawijaya, M.Pd 3. Hendri Daya Putra, S.Ag	KPU Provinsi KPU Provinsi
4.	Sumatera Barat	4. Iin Irwanto, S.T., M.M 5. Junaidi, S.E., M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
		1. Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum. 2. Aidinil Zetra, S.IP., M.A., PhD	Masyarakat Masyarakat
		3. Izwaryani, S.Ag 4. Yuzalmon, S.Ag., S.H., M.Si	KPU Provinsi KPU Provinsi
5.	Riau	5. Elly Yanti, S.H 6. Nurhaida Yetti, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
		1. Indra Safri, S.Sos., M.Si 2. Abd. Razak. Jer, SE., M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Abdul Rahman, SE 4. Drs. Joni Suhaidi	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Hasan, S.Ag., M.Si 6. Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
6.	Kepulauan Riau	1. Dr. Zaitun, S.S., M.Ag 2. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.	Masyarakat Masyarakat
		3. Sriwati, S.E., MM 4. Priyo Handoko, S.A.P., M.A	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Said Abdullah Dahlawi, S.T 6. Idris, S.TH.I	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
7.	Jambi	1. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag. 2. Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H, M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. H.M. Subhan, S.Ag., M.H 4. Ahdiyenti, S.Ag., M.Pd.I	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Rofiqoh Pebrianti, S.P	Bawaslu Provinsi
8.	Bangka Belitung	1. Sugesti, M.Pd.I 2. Bagong Susanto, S.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Guid Cardi, SIP 4. Husin, S.Pd.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Jafri, S.Pd., Si	Bawaslu Provinsi
9.	Bengkulu	1. Heri Sunaryanto, M.A., Ph.D 2. Drs. Yuharuddin, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Siti Baroroh, S.Ag., M.Si 4. Emex Verzoni, SE	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd 6. Halid Saifullah, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
10.	Lampung	1. Dr. Nanang Trenggono, M.Si	Masyarakat
		2. Antoniyus, S.IP 3. Titik Sutriningsih, S.E., M.M	KPU Provinsi KPU Provinsi
		4. Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I 5. Tamri, S.Hut., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
11.	DKI Jakarta	1. Drs. Aminullah 2. Dr. Radian Syam, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Marlina, S.H 4. Partono, S.IP., M.A	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si 6. Siti Khopipah, S.Ag., M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
12.	Banten	1. Drs. Solihin, M.Pd 2. Sri Yanuarti	Masyarakat Masyarakat
		3. Ramelan, S.Hi 4. Masudi, SE	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Samani, S.Sos 6. Badrul Munir, S.Ag., S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
13.	Jawa Barat	1. Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si 2. Dra. Mudiya Rahmatunnisa, M.A., Ph.D	Masyarakat Masyarakat
		3. Titik Nurhayati, M.Hum., M.H	KPU Provinsi
		4. Zaki Hilmi	Bawaslu Provinsi
14.	Jawa Tengah	1. Dr. Jeferson Kameo, SH., LLM 2. Dr.Sos. Dra. Fitriyah, MS	Masyarakat Masyarakat
		3. Paulus Widiyantoro 4. Putnawati	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si 6. M. Roffiudin, S.H.I., M.I.Kom	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
15.	Jawa Timur	1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. 2. Dr. Sufyanto, S.Ag., M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Gogot Cahyo Baskoro 4. Insan Qoriawan	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si 6. Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
16.	D.I. Yogyakarta	1. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si. 2. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Masyarakat Masyarakat
		3. Muh. Zaenuri Ikhsan 4. Wawan Budiyanto	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Agus Muhamad Yasin, S.Sos 6. Muh. Amir Nashiruddin, S.H.I	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
17.	Bali	1. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si 2. Dr. Drs. I. Made Wena, M.Si	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. I Dewa Agung Gede Lidartawan 4. Luh Putu Sri Widyastini	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. I Wayan Widyardana Putra, SE 6. Ir. I Ketut Sunadra, M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
18.	Nusa Tenggara Barat	1. Dr. Drs. Syafruddin, M.S 2. Hesty Rahayu, ST., MM	Masyarakat Masyarakat
		3. Suhardi Soud, S.E., MM 4. Zuriati, SP	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, SP., MP 6. Suhardi, S.IP., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
19.	Nusa Tenggara Timur	1. Mikhael Feka, S.H., M.H 2. Dr. Detji K. E. R. Nuban, S.H., M.Hum	Masyarakat Masyarakat
		3. Thomas Dohu, S.Hut., M.Si 4. Lodowyk Fredrik, S.T	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Melpi M. Marpaung, S.T 6. Noldi Tadu Hungu, S.Pt	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
20.	Kalimantan Barat	1. Jumadi, S.Sos., M.Si., Ph.D 2. Umi Rifdiyawaty, S.H, M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si 4. Lomon, S.Sos	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Mohamad, S.H 6. Ruhermansyah, S.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
21.	Kalimantan Tengah	1. Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H. 2. Dr. Ir. H. Syamsuri Yusup, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Wawan Wiraatmaja 4. Sapta Tjita	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Tity Yukrisna, S.Sos., MAP 6. Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
22.	Kalimantan Selatan	1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH, M.Hum 2. Dr. Jamaluddin, M.Si.	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. Sarmuji, S.Ag., M.Ag 4. Siswandi Reya'an, S.Pd	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Azhar Ridhanie, SHI., M.IP 6. Nur Kholis Majid, M.Pd	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
23.	Kalimantan Timur	1. Prof. Dr. Suhartono, SE., MM 2. Mohammad Taufik, S.Sos., M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Iffa Rosita, SE., MM 4. Suardi, S.Sos	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Dr. Saipul, S.Sos., M.Si 6. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
24.	Kalimantan Utara	1. Dr. Nurasikin, SHI., M.H. 2. Andi Siti Nuhriyati, S.E., M.Si.	Masyarakat Masyarakat
		3. Suryanata Al Islami, S.HI., M.H 4. Teguh Dwi Subagyo, S.Hut	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Rustam Akif, S.Pd., SH., M.Pd 6. Arif Rochman, SE., M.M	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
25.	Gorontalo	1. Dr. Roy Marthen Moonti, S.H., M.H 2. Bala Bakri, M.M	Masyarakat Masyarakat
		3. Sophian Rahmola, M.Si 4. Hendrik Imran, M.Ag	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Jaharudin Umar, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H 6. Ahmad Abdullah, S.Ag	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
26.	Sulawesi Utara	1. Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd 2. Dra. Trilke Erita Tulung, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Lanny A. Ointu 4. Yessy Y. Momongan	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Kenly Poluan, S.Pd., M.Si 6. Supriyadi Pangellu, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
27.	Sulawesi Barat	1. Mirawati, S.Pd., M.Pd 2. Mursalim, S.Ag., M.H.	Masyarakat Masyarakat
		3. Rustang, S.Ag., M.Pd.I 4. Said Usman Umar, S.Pd.I	KPU Provinsi KPU Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		5. Sulfan Sulo, S.SIP., M.Si 6. Ansharullah A. Lidda, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
28.	Sulawesi Tengah	1. Dr. As Rifai, S.IP., M.Si 2. Leli Tibaka, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Samsul Y. Gafur, S.H 4. Halima, S.Ag	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Darmiati, S.H 6. Jamrin, S.H., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
29.	Sulawesi Tenggara	1. Tina Dian Ekawati Taridala, S.H., M.H 2. Muhammad Alifuddin	Masyarakat Masyarakat
		3. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si 4. Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Munsir Salam, S.Pd., M.AP 6. Sitti Munadarma, SP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
30.	Sulawesi Selatan	1. Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si 2. Dra. Rahmiwati Agustini, M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Fatmawati, S.S., M.A. 4. Misna M. Attas	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Drs. Saiful Jihad, M.Ag 6. Asradi, SE., M.H	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
31.	Maluku	1. Dr. Reny Heroni Nendissa, S.H., M.H 2. Dr. Mike J. Rolobessy, M.T	Masyarakat Masyarakat
		3. Abdul Khalil Tianotak, SE 4. Hanafi Renwarin, S.Sos., M.Si	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Thomas Tomalatu Wakano, S.H 6. Dr. Subair, S.Ag., M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
32.	Maluku Utara	1. Sahrani Somadayo, M.Si 2. Mardia Ibrahim, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Mohtar Alting, SHI 4. Safrina Rahma Kamaruddin, S.Pi	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Muksin Amrin, SH., M.H 6. Ikbal Ali, S.P	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
33.	Papua	1. Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.H. 2. Yacob Paisei, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. Diana Dortehea Simbiak, S.Sos 4. Adam Arisoj, SE	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H 6. Ronald M. Manoach, S.T	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
34.	Papua Barat	1. Napolion Fakdawer, S.Pd 2. Amus Atkana, S.Pt., M.M	Masyarakat Masyarakat
		3. Nortbertus, SP., M.Hum 4. H. Abdul Halim Shidiq	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Muh. Nazil Hilmie, S.Sos	Bawaslu Provinsi

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



PROF. DR. MUHAMMAD, S.IP., M.SI